



# Polda Resmi Panggil



# UJ dan Zul

Bansos Kalbar; Bidik Delapan Orang Calon Tersangka

PONTIANAK—Polda Kalbar segera memanggil mantan Gubernur dan Ketua DPRD Kalimantan Barat, Usman Ja'far (UJ) dan Zufadli (Zul) untuk dilakukan

◆ Ke Halaman 7 kolom 1

## Kasus Bansos KONI Kalbar bermula

- Audit reguler BPK Perwakilan Kalbar terhadap laporan keuangan Pemprov tahun anggaran 2008.
- BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias disclaimer opinion (DO)
- Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) mengindikasikan adanya kerugian negara atau penggunaan Bansos bermasalah.
- 1 Temuan dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, yang digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp10,07 miliar.
- 2 Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh wakil bendahara KONI kepada Satgas Pra-PON sebesar Rp1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan.
- 3 Pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh wakil bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp8,59 miliar
- 4 Adanya ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah sebesar Rp2,114 miliar





## Polda Resmi Panggil UJ dan Zul

**Sambungan dari halaman 1**

pemeriksaan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) tahun anggaran 2006-2008.

"Suratnya sudah siap. Tinggal dikirim saja. Insya Allah dalam minggu ini sudah dikirim," ungkap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol Widodo, Senin (26/1).

Dikatakan Widodo, surat yang akan dikirim ini merupakan permohonan kepada Dewan Kehormatan (DK) DPR RI untuk menghadirkan kedua anggotanya ini. Mengingat Usman Ja'far dan Zulfadli menjabat sebagai anggota DPR RI.

"Ini surat permohonan kepada Ketua DPR RI, agar bisa menghadirkan kedua anggotanya yang terjerat persoalan hukum. Berdasarkan peraturan maksimal 30 hari untuk bisa menghadirkan keduanya. Ya mudah-mudahan tidak sampai 30 hari, keduanya bisa dihadirkan dan bisa langsung diproses," kata Widodo.

Menurutnya, kasus korupsi Bansos Provinsi Kalbar ini tinggal menunggu hari lagi. Apa yang selama ini ditunggu-tunggu

akhirnya telah keluar. Hasil PKN (penghitungan kerugian negara) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sudah diterima Polda. Dimana hasil penghitungan kerugian negara mencapai Rp20 miliar. Terdiri dari hasil audit Bansos KONI dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura. Dengan keluarnya hasil audit investigasi atau hasil penghitungan kerugian negara oleh BPK, maka Polda Kalbar tidak ragu lagi untuk mengambil langkah dan tindakan. Salah satunya dengan memanggil kedua tersangka.

"Ini adalah panggilan pertama sebagai tersangka. Tak perlu lagi diperiksa sebagai saksi, karena berdasarkan keterangan saksi yang ada, mengarah kepada dua orang ini. Sementara ini sudah 18 orang saksi yang diperiksa," bebernya.

Pihaknya tidak segan-segan menjemput paksa, jika keduanya mangkir dari panggilan. "Kalau panggilan pertama ini yang bersangkutan mangkir, kita panggil lagi. Tapi kalau masih mangkir, tidak menutup kemungkinan untuk jemput paksa. Tapi saya rasa tidak akan

mangkir, karena yang bersangkutan adalah pejabat negara," ujarnya. Disinggung soal rencana penahanan kedua tersangka, Widodo mengatakan akan melakukan penahanan. "Ya kalau tersangka korupsi, biasanya langsung ditahan," katanya.

Dikatakan Widodo, kasus korupsi Bansos Provinsi Kalimantan Barat tahun 2006-2008 merupakan salah satu kasus yang menjadi perhatian publik dan mendapat supervise dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Disamping itu, selain menetapkan UJ dan Zul sebagai tersangka, pihaknya telah membidik calon tersangka lainnya.

"Kasus ini akan terus berkembang. Tidak hanya dua orang ini saja, tapi ada delapan orang calon tersangka lainnya. Memang kasus ini, kasus yang sering ditanyakan oleh KPK," katanya. Kasus Bansos KONI Kalbar bermula dari hasil audit reguler yang dilakukan BPK Perwakilan Kalbar terhadap laporan keuangan Pemprov tahun anggaran 2008, termasuk dana Bansos tahun 2006 hingga tahun 2008. BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat

alias disclaimer opinion (DO) karena tidak meyakini beberapa kelompok penggunaan anggaran, diantaranya penggunaan dana Bansos untuk KONI. BPK Perwakilan Kalbar juga telah membentuk tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan hasilnya mengindikasikan adanya kerugian negara berupa empat penggunaan Bansos bermasalah, yakni temuan dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, yang digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp10,07 miliar.

Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh wakil bendahara KONI kepada Satgas Pra-PON sebesar Rp1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh wakil bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp8,59 miliar, serta adanya ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah sebesar Rp2,114 miliar. (arf)